

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap aset dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Undang-Undang di bidang keuangan negara membawa implikasi tentang perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai. Adanya peningkatan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Maka untuk mengurangi terjadinya kecurangan, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern yang baik dalam pelaksanaan kegiatannya.

Peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah menjadi sangat penting dan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan yang sedang dijalankan agar pemerintahan yang bersih dapat diwujudkan. Apabila kualitas pengendalian intern semakin baik, maka keinginan dan kesempatan bagi aparat pemerintahan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (melakukan kecurangan) diyakini akan semakin kecil sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintahan akan semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan di mata masyarakat umum akan semakin baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan sistem pengendalian intern didalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Kelemahan pengendalian intern dinilai oleh (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK melalui tiga aspek, yaitu: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD kelemahan struktur pengendalian intern, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Berdasarkan tiga kriteria tersebut, (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK selaku pengawas organisasi sektor publik mampu menilai apakah organisasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah memiliki dan menjalankan sistem pengendalian intern dengan baik dan benar.

Pengendalian intern memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan 5

pengendalian intern yang baik agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuannya. Perkembangan suatu pemerintah daerah membuat setiap pemerintah daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pengendalian intern didalam pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pada pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal yaitu meliputi 32% permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang terjadi pada pemda antara lain sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, dan entitas terlambat menyampaikan laporan. 46% permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang terjadi pada pemda, antara lain pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan. dan 22% permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern yang terjadi pada pemda antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.



Gambar 1. 1 Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal tahun 2020

Sumber : BPK, 2020

Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal yaitu meliputi 23% kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 65% kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 12% kelemahan struktur pengendalian intern.



Gambar 1. 2 Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2021

Sumber : BPK, 2021

Dari fenomena di atas bisa dilihat bahwa Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Japar, 2022). Pendapatan Asli Daerah diharapkan bisa membantu keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah tentu saja berbeda-beda untuk setiap daerah, karena kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan tergantung dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut dan juga besar/kecilnya potensi daerah untuk

mengelola sumber daya alam tersebut. Semakin banyaknya pos pendapatan daerah akan membuat masalah pengendalian intern meningkat. Banyaknya jumlah pendapatan yang diterima oleh daerah secara otomatis akan meningkatkan aktivitas belanja daerah. Apabila belanja daerah yang dilakukan tidak diikuti dengan aturan yang jelas, maka akan rentan terhadap masalah kecurangan. Peningkatan pendapatan yang diterima oleh daerah sebenarnya tidak memiliki jumlah yang terlalu besar akan tetapi intensitasnya yang tinggi membuat jumlahnya besar, seperti pajak daerah dan retribusi daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah merupakan suatu skala pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat besar kecilnya suatu daerah yang diukur dengan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin besarnya tingkat ukuran pemerintah daerah maka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Nova, 2020) Ukuran sebuah entitas dapat dijadikan sebuah gambaran secara umum yang bisa dilihat secara fisik luar organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang besar pula. Besarnya sumber daya yang dimiliki suatu daerah memungkinkan daerah tersebut untuk menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Jumlah penduduk menjadi pertimbangan dalam melihat tingkat kebutuhan pelayanan umum di suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu pemerintah daerah berarti semakin banyak dan beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal

itu diduga akan menyebabkan meningkatnya masalah kelemahan pengendalian internal.

Kompleksitas pemerintah daerah adalah tingkatan diferensiasi yang ada di pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah (M. Saferi, 2020). Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya serta memiliki area kerja yang luas dan tersebar, maka akan semakin sulit bagi organisasi tersebut untuk menjalankan pengendalian internnya. Organisasi tersebut akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan atau menerapkan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda didalam organisasi tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah” (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2017) (M. Saferi, 2020). Populasi dalam penelitian terdahulu yaitu 12 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Populasi yang peneliti lakukan yaitu pada 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian sebelumnya menggunakan data anggaran 2014-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan anggaran 2021-2022.

Berdasarkan dari latar belakang dan berbagai permasalahan yang ada terkait kelemahan pengendalian internal yang telah dijelaskan diatas, maka

penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
2. Bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
3. Bagaimana Kompleksitas Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Anggaran 2020-2021.
4. Bagaimana Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
5. Berapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
6. Berapa besar Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada Pemerintah

Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.

7. Berapa besar Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kompleksitas Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
4. Untuk mengetahui bagaimana Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada

Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.

6. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
7. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperluas ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi mengenai bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah dapat berpengaruh Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh wawasan khususnya mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah

terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini merupakan salah satu syarat ujian untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi program studi akuntansi di Universitas Pasundan Bandung.

b. Bagi Instansi

Bagi instansi tempat melakukan penelitian adalah membantu memberikan informasi kepada pihak instansi mengenai pendapatan daerah, ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah, sehingga memberikan langkah nyata yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan kinerja instansi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021. Data yang diperoleh penulis bersumber dari data website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai dengan selesai.